



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Widyadarmasatya  
Widyadarmasatya

## BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta  
Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 521818  
Surel : [birobinamentals@jogjaprovo.go.id](mailto:birobinamentals@jogjaprovo.go.id)  
Laman : [binamentals.jogjaprovo.go.id](http://binamentals.jogjaprovo.go.id)

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Februari 2024  
Kepala Biro Bina Mental Spiritual  
Setda DIY,



DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.  
NIP. 196806081998031011

# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama”:
  - Diukur dengan 2 indikator, yaitu persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan dan presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
  - Capaian kinerja sasaran tahun 2023 berdasarkan indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan sebesar 43% dari target 14% sehingga persentase total capaian terhadap target sebesar 307.14%. Selain itu, persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan tercapai 100% dari target 76%, atau total capaian kinerja terhadap target sebesar 131,58%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
  - Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan RB dengan kategori A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Dinamika Kebijakan pusat sesuai perubahan kondisi dan tuntutan pelaksanaan kebijakan terkait di lapangan;
2. Proses pengumpulan data oleh surveyor tidak mudah karena instansi mitra belum tentu dapat memenuhi permintaan dengan segera;
3. Dalam proses penyusunan produk hukum, peserta yang diundang berbeda-beda disetiap pertemuan sehingga pemahaman mengenai materi tidak berkesinambungan;
4. Beberapa tempat ibadah calon penerima hibah tidak menindaklanjuti proses hibah dikarenakan tercukupi oleh pendanaan di luar APBD, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika politik menjelang pemilu;
5. Tingkat kesadaran masyarakat penerima hibah dalam menyelesaikan administrasi hibah kurang optimal. Pada sisi lain, kurang kompak panitia/pengurus dapat menjadi hambatan dalam proses administrasi hibah. Meskipun secara keseluruhan penerima hibah telah mengumpulkan laporan penggunaan dana hibah, namun dalam proses pelaporannya masih ada yang harus diberi surat peringatan;
6. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih menuntut pegawai Biro Bina Mental Spiritual untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi informasi di setiap aspek pekerjaan.



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif .....	2
Daftar Isi .....	4
Daftar Tabel .....	5
Daftar Gambar .....	6
BAB I Pendahuluan .....	7
1.1 <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi .....	7
1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	11
1.4 Isu-Isu Strategis .....	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	13
1.6 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022 .....	15
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	24
3.2 Capaian Kinerja Lainnya .....	49
3.3 Efisiensi Anggaran .....	51
3.4 Inovasi .....	52
3.5 Lintas Sektor .....	53
BAB IV Penutup .....	59
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja .....	60
LAMPIRAN .....	61

## Daftar Tabel

I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
I.2	Sarana-Prasarana .....	14
I.3	Anggaran Tahun 2023 .....	14
I.4	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022 .....	15
II.1	Sasaran Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY, 2023-2026 .....	17
II.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
II.3.1	Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	18
II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	19
II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023.....	21
II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023 .....	22
III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
III.2	Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	24
III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	26
III.4	Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	26
III.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	28
III.6	Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1 .....	30
III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	42
III.8	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	43
III.9	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 .....	43
III.10	Score PKKI .....	48
III.11	Kontribusi Sasaran Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah .....	49
III.12	Kontribusi Program Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah .....	50
III.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 .....	51
III.14	Inventarisasi Lintas Sektor Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY (terkait RB tematik) .....	54

# Daftar Gambar

I.1	Cascading Kinerja .....	8
I.2	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY .....	9
I.3	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY .....	11
II.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....	23
III.1	Pergub DIY Nomor 88/2023 tentang Desain Olahraga Daerah 2022-2027..	39
III.2	Kajian yang dihasilkan Biro Bina Mental Spiritual .....	40
III.3	Pembinaan Mental Umat Beragama (Perayaan Nyepi) .....	40
III.4	Festival Pesparani Nasional ke-III .....	41
III.5	Launching Kegiatan Kampung Berkah .....	41

# BAB I Pendahuluan

## **Bab I berisi:**

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

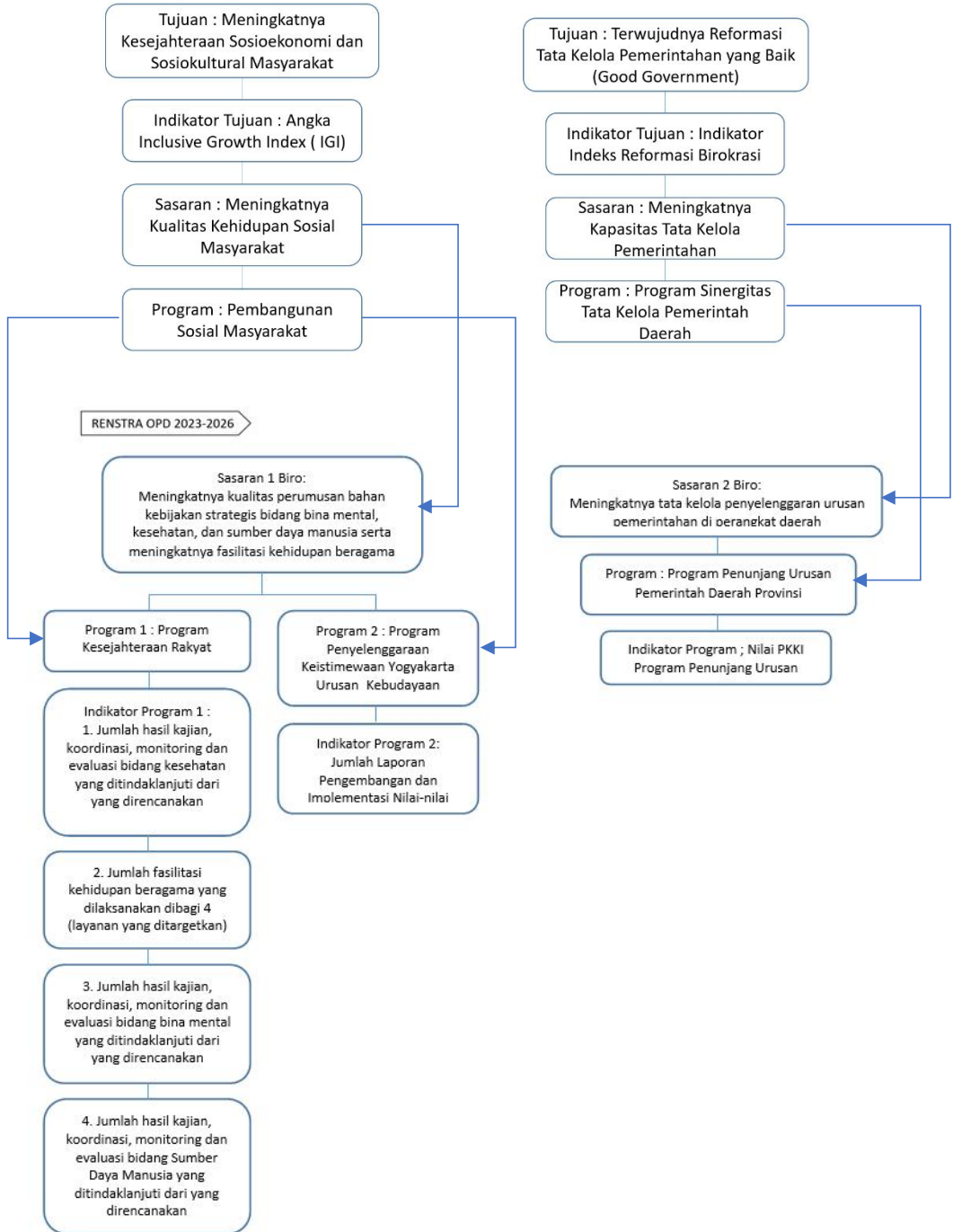
### **1.1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah***

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



**Gambar I.1 Cascading Kinerja**

RPD 2023-2026

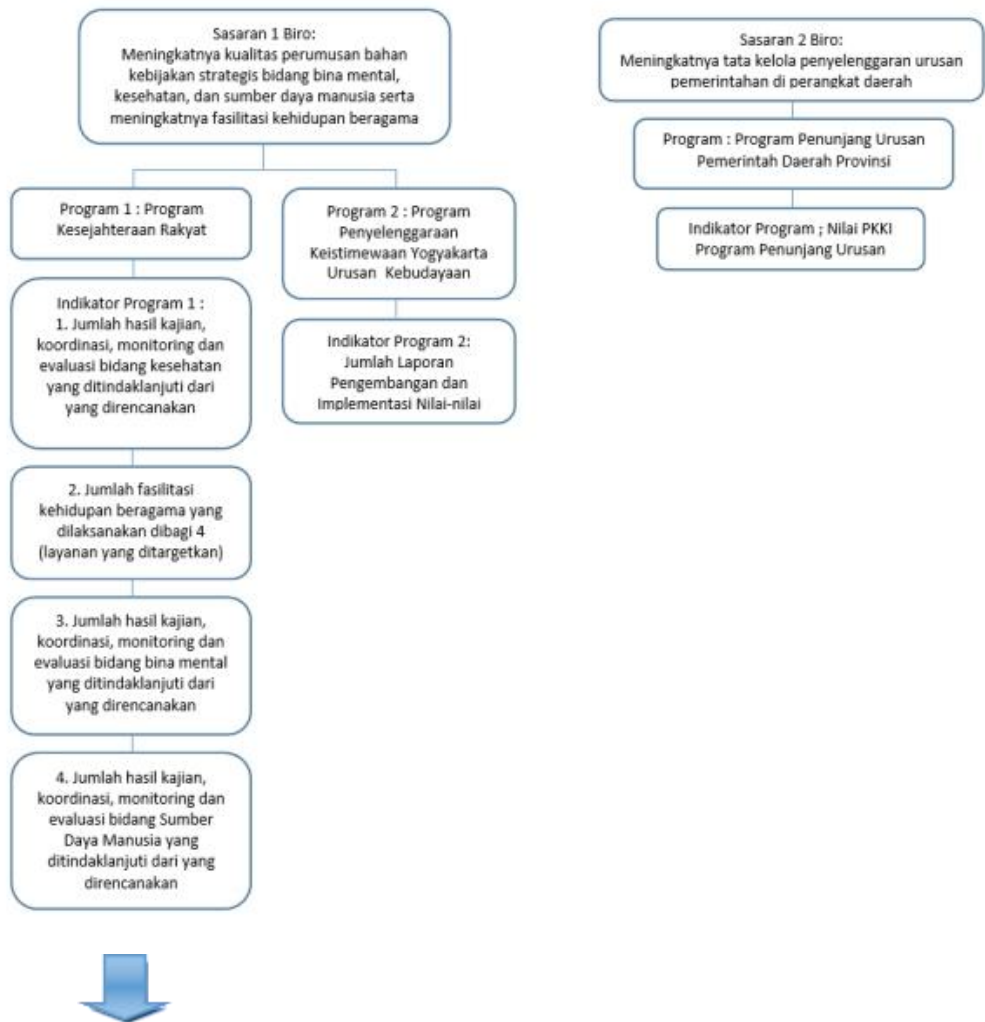


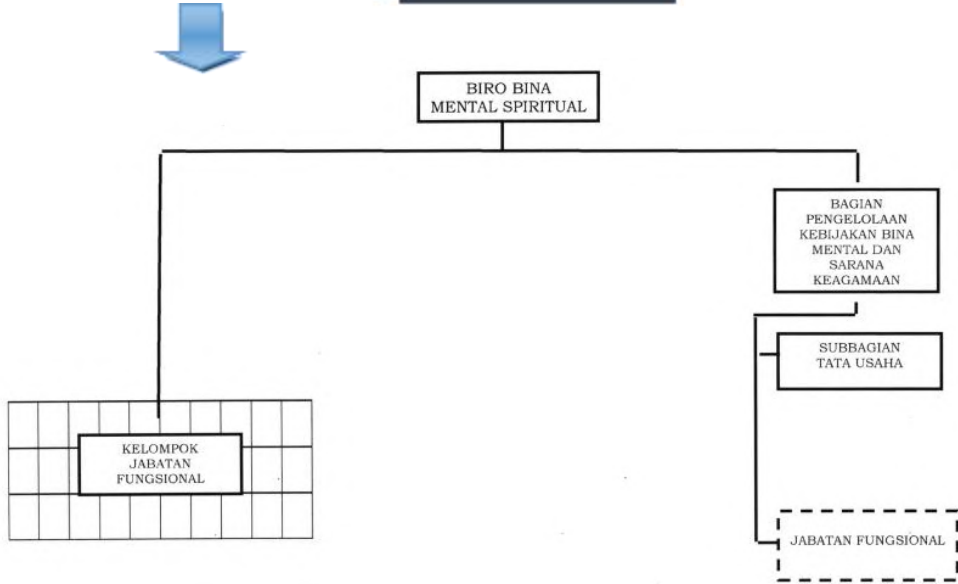
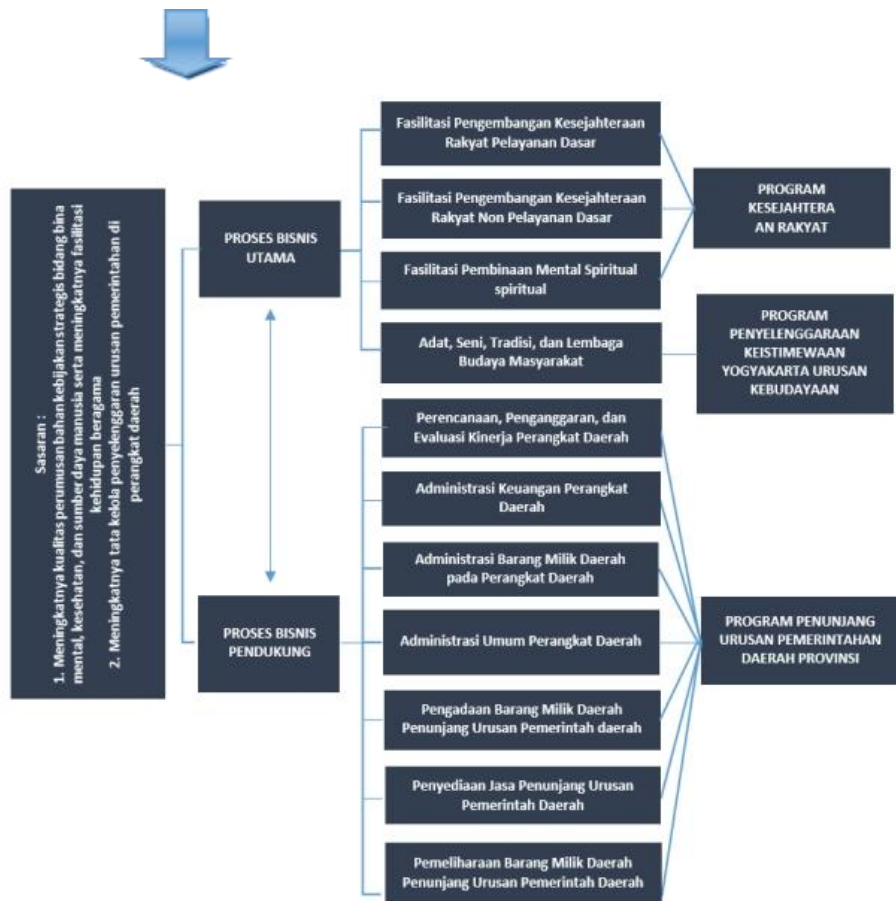
Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Biro Bina Mental Spiritual 2023-2026

## 1.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY**





Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

### 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

#### **Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual. Adapun fungsi Biro Bina Mental Spiritual sebagai berikut

1. Penyusunan program kerja Biro Bina Mental Spiritual;
2. Penyiapan bahan kebijakan bidang kebijakan bina mental spiritual, fasilitas kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitas kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
4. Fasilitasi kehidupan beragama
5. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
6. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro
7. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro
8. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Biro Bina Mental Spiritual dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Biro	1. Di bawah Kabag Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan
2. Kabag Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	a. Analis Bina Kehidupan Agama
3. Kasubbag Tata Usaha	2. Di bawah Kasubbag Tata Usaha:
4. Kelompok Jabatan Fungsional	a. Pengadministrasi Keuangan;
	b. Bendahara;
	c. Verifikator Data Laporan Keuangan;
	d. Pengelola Akuntansi;
	e. Kustodian Barang Milik Negara;
	f. Pengelola Gaji;
	g. Analis SDM Aparatur
	h. Pranata Kearsipan;
	3. Tim Kerja Bidang Kesehatan
	a. Analis Kesehatan
	4. Tim Kerja Bidang SDM
	a. Analis Budaya

#### 1.4. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah institusi sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan di bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia. Isu strategis di Biro Bina Mental Spiritual antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan;
2. Pemerataan kualitas pendidikan di DIY;
3. Pelestarian budaya baik *tangible* maupun *intangibile*;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
5. Pemerataan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat ;
6. Fasilitasi dan pelayanan keagamaan;
7. Ancaman intoleransi antar umat beragama.

### 1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			S2	S1	D3	D2	SMA		S2	S1	D3	D2	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	1	S2	S1				1	1					1	
	2. Pengawas	1	S2	S1				1	1					1	
	3. Pelaksana	21	S2	S1	D3	D2	SMA	21	2	12	5	1	1	5	16
C.	Jabatan Fungsional	6	S2	S1				6	5	1				3	3
	Jumlah	30						30						11	19

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (43%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang (33%), D3 5 orang (16%), D2 1 orang (3%) SMA 1 orang (3%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, sedangkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang pelaksana dengan jabatan penyusun program dan anggaran. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di bidang bina mental, sumber daya manusia dan kesehatan.



**Tabel I. 2 Sarana-Prasarana**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Alat-alat Angkutan	9 unit	950.427.070,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	200 unit	729.058.125,00
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	4 unit	43.560.000,00
1	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	198 buku	15.654.000,00
	Jumlah		1.738.699.195,00

Sumber: Data Neraca Biro 31 Desember 2023

Sarana prasarana didukung oleh 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 4 (empat) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan roda dua, dan 2 (dua) sepeda. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

**Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		
4 1 02	Retribusi Daerah	0		
	Jumlah Pendapatan	0		
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 33.232.524.400	Rp 33.095.954.400	(136.570.000)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp 60.658.600	Rp 60.658.600	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.346.865.800	Rp 5.210.295.800	(136.570.000)
5 1 05	Belanja Hibah	Rp 27.825.000.000	Rp 27.825.000.000	
5 2	BELANJA MODAL	Rp 46.436.300	Rp 46.436.300	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 24.151.200	Rp 24.151.200	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 7.108.500	Rp 7.108.500	
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 2.076.600	Rp 2.076.600	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Belanja	Rp 34.055.960.700	Rp 33.142.390.700	(136.570.000)
	Total Surplus/(Defisit)	Rp34.055.960.700	Rp 33.142.390.700	(136.570.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0		
	Pembiayaan Neto	0		

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Bina Mental Spiritual Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Biro Biro Bina Mental Spiritual semula Rp34.055.960.700 dan mengalami perubahan menjadi Rp33.142.390.700 atau berkurang Rp (136.570.000) Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

## 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

**Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan pihak eksternal terkait dalam rangka pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang lebih baik, termasuk dalam hal ini pencapaian kinerja hibah keagamaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengintensifkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran/kinerja Biro Bina Mental Spiritual.</li> <li>Memaksimalkan kinerja hibah keagamaan melalui monitoring dan evaluasi selama proses hibah</li> </ol>

## BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### **Bab II berisi:**

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY selama empat tahun adalah:

**“Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli”**

Adapun sasaran Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Sasaran Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY, 2023-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				Baseline 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia,serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	Pesentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	4	14	24	34	44	44
		Persentase pelaksanaan fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	75	76	77	78	79	79
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya bahan perumusan kebijakan strategis yang berkualitas dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia.	Meningkatkan efektifitas koordinasi penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual sehingga menghasilkan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas.	Meningkatkan persentase peningkatan bahan perumusan kebijakan strategis yang berkualitas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia.
		Meningkatkan koordinasi dengan semua <i>stakeholders</i> terkait dengan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia	Meningkatkan Persentase peningkatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia.

## 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3.1. Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang )
Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan pengelolaan bina mental spiritual	<b>1.1 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>31.650.252.400</b>	<b>31.650.252.400</b>	
	1.1.1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	30.871.193.000	30.871.193.000	
	1.1.1.1 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30.871.193.000	30.871.193.000	
	1.1.2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	341.660.900	341.660.900	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang )
	1.1.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	116.660.900	116.660.900	
	1.1.2.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	225.000.000	225.000.000	
	1.1.3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	437.398.500	437.398.500	
	1.1.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	437.398.500	437.398.500	
	1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	777.000.000	640.430.000	(136.570.000)
	1.2.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	777.000.000	640.430.000	(136.570.000)
	1.2.1.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	777.000.000	640.430.000	(136.570.000)
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran Rp32.290.682.400</b>			

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Spiritual Tahun 2023

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang )
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>851.708.300</b>	<b>851.708.300</b>	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.765.100	62.765.100	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.430.000	47.430.000	-
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.464.000	9.464.000	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.540.300	<b>59.540.300</b>	
1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.378.000	46.378.000	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.748.300	6.748.300	



No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang )
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.414.000	6.414.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>14.280.600</b>	<b>14.280.600</b>	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>14.280.600</b>	<b>14.280.600</b>	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>475.214.800</b>	<b>475.214.800</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.408.600	11.408.600	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	19.000.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.996.400	5.996.400	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.241.800	11.241.800	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.568.000	313.568.000	
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.000.000	99.000.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>46.961.300</b>	<b>46.961.300</b>	
1.5.2	Pengadaan Mebel	13.100.000	13.100.000	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.676.200	24.676.200	
1.5.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.076.600	2.076.600	
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.108.500	7.108.500	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>24.730.000</b>	<b>24.730.000</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.230.000	13.230.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>168.216.200</b>	<b>168.216.200</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang )
	<i>Daerah</i>			
1.7.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan</i>	111.570.400	111.570.400	
1.7.2	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	6.551.800	6.551.800	-
1.7.3	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	31.794.000	31.794.000	-
1.7.4	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	18.300.000	18.300.000	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Spiritual Tahun 2023

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia,serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Pesentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.	%	14	Triwulan I	14
					Triwulan II	14
					Triwulan III	14
					Triwulan IV	14*)
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)

2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kesejahteraan Rakyat (APBD)	Rp32.157.886.600
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp910.506.300
	Jumlah Anggaran	Rp33.068.392.900

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Pesentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	14	Triwulan I	14
					Triwulan II	14
					Triwulan III	14
					Triwulan IV	14*)
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)

2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kesejahteraan Rakyat (APBD)	Rp31.650.252.400
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp851.708.300
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp640.430.000
	Jumlah Anggaran	Rp33.142.390.700

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sungguh.jogjaprov.go.id](http://sungguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

**Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatkan fasilitas kehidupan beragama	Indikator Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.  Meta Indikator: Jumlah hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tahun n	%	307.14	14	43	307.14	Sangat Baik	44

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		dibagi jumlah target hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia tahun 2023-2026							
		<u>Indikator:</u> Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan.  <u>Meta Indikator:</u> Jumlah fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan (1. Pembinaan Mental 5 Agama; 2. Pelayanan Jamaah Haji; 3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan; 4. Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan) dibagi 4 (layanan yang ditargetkan) dikali 100	%	131,58	76	100	131,58	Sangat Baik	79
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Pemerintahan di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori RB Perangkat Daerah  <u>Meta Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	100	A	A	100	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama**

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:



**Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	Jumlah hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tahun (n) dibagi jumlah target hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia tahun 2023-2026
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan (1. Pembinaan Mental 5 Agama; 2. Pelayanan Jamaah Haji; 3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan; 4. Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan) dibagi 4 (layanan yang ditargetkan) dikali 100

Capaian dari perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta fasilitasi kehidupan beragama dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD 2026	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	n/a	14	43	307.14	44	307.14

No	Indikator	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir	Capaian 2023 Terhadap Target
2	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	n/a	76	100	131.58	79	131.58

1. Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.

Pada tahun 2023 telah dihasilkan 9 (Sembilan) dokumen dari target 3 (tiga) dokumen naskah kebijakan, diantaranya:

- 1) SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) SK Gubernur DIY Nomor 138/KEP/2023 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2023.
- 3) SK Gubernur DIY Nomor 183/KEP/2023 tentang Penetapan Ketua Kafilah Haji DIY Tahun 1444 H/ 2023 M.
- 4) SK Gub DIY No.106/KEP/2023 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari.
- 5) SK Gub No 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil jenazah DIY..
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2027.
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027.
- 9) Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pembinaan Kaum (Rois) di Kalurahan.

2. Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan

Dari 4 (empat) macam fasilitasi kehidupan beragama yang ditargetkan, dapat terlaksana keseluruhan. Fasilitasi tersebut diantaranya:

- 1) Pembinaan Mental 5 Agama; Pengajian pejabat dan aparat 10x (target anggaran 4x), Peringatan Hari Besar Keagamaan (Perayaan Nyepi, Peringatan Isra Miraj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi, Natal, Waisak).
- 2) Pelayanan Jamaah Haji; Pengiriman Petugas Haji, Pengantaran Jamaah Haji, Pamitan Jamaah Haji, dan Penyambutan Kembali Jamaah Haji.
- 3) Penyelenggaraan Festival Keagamaan; Penyelenggaraan STQ daerah di DIY, Penyelenggaraan STQ Nasional di Jambi.
- 4) Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan; Penyaluran Bantuan Hibah sebanyak 1085 tempat ibadah dan 8 lembaga, Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban.

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan  <u>Meta Indikator :</u>  Jumlah hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental,	n/a	14	43 (9 / 21 *100)	307.14 (43%/14% *100%)	44	307.14

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tahun n dibagi jumlah target hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia tahun 2023-2026						
	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan.  <u>Meta Indikator:</u> Meta Indikator : Jumlah fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan (1. Pembinaan Mental 5 Agama; 2. Pelayanan Jamaah Haji; 3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan; 4. Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan) dibagi 4 (layanan yang	n/a	76	100 (4/4*100)	131,58 (100% / 76% *100%)	79	131.58

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ditargetkan) dikali 100						

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan terhadap target sebesar 307.14% dan capaian indikator Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan terhadap target sebesar 131.58%, sehingga persentase realisasi terhadap target terlampaui.
- b. Terdapat perbedaan indikator pada tahun 2022 dan 2023 sehingga data tahun 2022 tidak dapat ditampilkan.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 mencerminkan ketercapaian target.

Keberhasilan capaian Sasaran 1 dengan Indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan dan presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III. 6 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1. Program Kesejahteraan Rakyat		Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	1 dokumen	3 dokumen	300%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	76	100	131.58%
		Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	1 dokumen	3 dokumen	300%
		Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	1 dokumen	7 dokumen	700%
	1.1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Bahan Kebijakan Fasilitasi Bina Mental/Pelayanan Lembaga Keagamaan	100	100	100%
	1.1.1 Fasilitasi kelembagaan Bina Spiritual	Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan	1093 lembaga	1093 lembaga	100%
		Pelayanan Jamaah Haji	100	100	100%
		Penyelenggaraan Festival Keagamaan	100	100	100%
		Pembinaan Mental 5 Agama	100	100	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9 dokumen	18 dokumen	200%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.1.1. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan: 4 dokumen 1. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran TP UKS/M: 1 dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan: 1 dokumen 3. Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di DIY: 1 dokumen 4. Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAD PIJAR) : 1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%



	1.1.2.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan: 14 dokumen</p> <p>1. Ekspose Monev Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten/Kota: 1 dokumen</p> <p>2. Ekspose Monev Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi: 1 dokumen</p> <p>3. Ekspose Monev Kebijakan Jaminan Kesehatan: 1 dokumen</p> <p>4. Ekspose Monev Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat: 1 dokumen</p> <p>5. Ekspose Monev Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer: 1 dokumen</p> <p>6. Ekspose Monev Kebijakan RAD Stunting: 1 dokumen</p> <p>7. Ekspose Monev Pelaksanaan Kebijakan</p>	5 dokumen	14 dokumen	280%
--	--------	---	---	-----------	------------	------

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Pencegahan & Penanggulangan HIV AIDs di DIY: 1 dokumen  8. Ekspose Monev Kebijakan Standar Pelayanan Minimal: 1 dokumen  9. Laporan Rakorda Kebijakan Jaminan Kesehatan: 1 dokumen  10. Laporan Pelaksanaan Posbindu Satriya: 1 dokumen  11. Rakorda Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer: 1 dokumen  12. Rakorda Kebijakan pencegahan & penanggulangan Penyakit Menular di DIY: 1 dokumen  13. Rakorda Kebijakan pencegahan & penanggulangan Penyakit Tidak Menular di DIY: 1 dokumen  14. Rakorda Kebijakan penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di DIY: 1 dokumen			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	5 dokumen	5 dokumen	100%

	<p>1.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata : 5 dokumen</p> <p>1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi desa/ kelurahan budaya: 1 dokumen</p> <p>2. Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Tari Klasik : 1 dokumen</p> <p>3. Laporan Hasil Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural : 1 dokumen</p> <p>4. Laporan hasil Kajian Rencana Aksi Daerah</p>	<p>5 dokumen</p>	<p>5 dokumen</p>	<p>100%</p>
--	---	---	------------------	------------------	-------------

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 dokumen 5. Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah - Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 dokumen			
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan					
	1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	3 laporan	3 laporan	100%
	1.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat : 3 laporan 1. Laporan Pesparani: 1 laporan 2. Laporan Kampung Berkah: 1 laporan 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kampung Berkah: 1 laporan	3 laporan	3 laporan	100%

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung dari keberhasilan pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan:

**a. Capaian Program Kesejahteraan Rakyat yang meliputi:**

**1) Ketepatan Menganalisa Kebutuhan Regulasi**

Biro Bina Mental Spiritual selaku *leading sector* kebijakan strategis di bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia melaksanakan penjangkauan aspirasi terkait permasalahan dan isu strategis melalui forum OPD dan Forum Konsultasi Publik. Permasalahan dan isu strategis diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat sehingga dihasilkan 9 (sembilan) regulasi di tahun 2023. Berikut ini merupakan salah satu regulasi yang dihasilkan:

**Gambar III.1 Pergub DIY Nomor 88/2023 tentang Desain Olahraga Daerah 2022-2027**



**2) Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penyusunan Kajian dan Bahan Kebijakan**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan utamanya penyusunan kajian dan bahan kebijakan diawali dengan koordinasi dan sinkronisasi baik secara internal di Biro atau bekerjasama dengan OPD lain yang terlibat. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal mampu menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam rangka merumuskan kajian dan kebijakan yang berkualitas.

**Gambar III.2. Salah satu kajian yang dihasilkan Biro Bina Mental Spiritual**



**3) Kegiatan Fasilitasi Kehidupan Beragama Terlaksana dengan Baik**

Selain menyusun naskah bahan kebijakan, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan fasilitasi kehidupan beragama. Fasilitasi tersebut meliputi Pembinaan Mental Umat Beragama, Pelayanan Jamaah Haji, Penyelenggaraan Festival Keagamaan, Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan.

**Gambar III.3. Pembinaan Mental Umat Beragama (Perayaan Nyepi)**



**b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan**

**1) Festival Pesparani Nasional ke-III berjalan dengan baik**

Pelaksanaan Festival Pesparani nasional ke-III berlangsung di Jakarta pada 27 Oktober - 1 November 2023. Sebelum terselenggaranya festival, telah dilaksanakan pelatihan kontingen Pesparani di Yogyakarta.

**Gambar III.4. Festival Pesparani Nasional ke-III**



**2) Kegiatan Kampung Berkah terlaksana dengan baik**

Kegiatan kampung berkah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk budidaya perikanan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting. Dalam praktiknya, Biro Bina mental Spiritual bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Penasihat), Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul (penerima BKK), Patil Berkah (mendampingi dalam proses perencanaan, penyediaan benih, pengelolaan hingga pemasaran), Baznas (mitra Biro Bina Mental dalam menginisiasi program kampung berkah), Paniradya Kaistimewaan dan BPKA (penyedia, fasilitator, dan verifikator anggaran BKK).

**Gambar III.5. Launching Kegiatan Kampung Berkah**



**Faktor Pendukung keberhasilan**

- a. Tema rumusan kebijakan yang sudah ditentukan;
- b. Kerjasama yang efektif dengan mitra kerja dalam penyusunan isu strategis;
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan;



- d. Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- e. Dukungan teknologi informasi yang mutakhir.

**Faktor Penghambat keberhasilan**

- a. Dinamika Kebijakan pusat sesuai perubahan kondisi dan tuntutan pelaksanaan kebijakan terkait di lapangan;
- b. Proses pengumpulan data oleh surveyor tidak mudah karena instansi mitra belum tentu dapat memenuhi permintaan dengan segera;
- c. Dalam proses penyusunan produk hukum, peserta yang diundang berbeda-beda disetiap pertemuan sehingga pemahaman mengenai materi tidak berkesinambungan;
- d. Beberapa tempat ibadah calon penerima hibah tidak menindaklanjuti proses hibah dikarenakan tercukupi oleh pendanaan di luar APBD, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika politik menjelang pemilu;
- e. Tingkat kesadaran masyarakat penerima hibah dalam menyelesaikan administrasi hibah kurang optimal. Pada sisi lain, kekurang kekompakan panitia/pengurus dapat menjadi hambatan dalam proses administrasi hibah. Meskipun secara keseluruhan penerima hibah telah mengumpulkan laporan penggunaan dana hibah, namun dalam proses pelaporannya masih ada yang harus diberi surat peringatan.

**3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	100%	A	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- Capaian Indikator sasaran Kategori RB Perangkat Daerah pada tahun 2022 dan 2023 adalah A
- Nilai Reformasi Birokrasi dari tahun 2023 adalah 88.17 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 82.39.
- Capaian indikator sasaran pada tahun 2023 terhadap target mencerminkan ketercapaian target.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III. 9 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.36	93.18	103,12%
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangakta Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
	1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%
	2.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%
	4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	5.1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	100%
	5.3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	100%
	5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	3 laporan	100%
	6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100%
	6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	100%
	7.2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit	48 unit	100%
	7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	85 unit	100%
	7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	30 unit	100%
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>		<b>Rp851.708.300</b>	<b>Rp698.316.626</b>	<b>81.99</b>
Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	1.1 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1093 lembaga	1093 lembaga	100%
	2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9 dokumen	18 dokumen	200%
	2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	4 dokumen	4 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
	2.2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	5 dokumen	14 dokumen	280%
	3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	5 dokumen	5 dokumen	100%
	3.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	5 dokumen	5 dokumen	100%
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>		<b>31.650.252.400</b>	<b>31.276.357.056</b>	<b>98.82</b>
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1. Adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 laporan	3 laporan	100%
	1.1 Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 laporan	3 laporan	100%
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>		<b>640.430.000</b>	<b>579.786.028</b>	<b>90.53</b>

Capaian tersebut didukung dari:

### 3. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada tahun 2023 Biro Bina Mental Spiritual memperoleh nilai PKKI sebesar 93.18 dari target 90.36, sehingga mencerminkan ketercapaian target. Berikut ini merupakan rincian score PKKI pada setiap subkegiatan:

**Tabel III.10 Score PKKI**

No	Program/Sub Kegiatan	Score
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	
1.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	96,60
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>90,28</b>
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,60
2.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	92,40
2.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,27
2.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,60
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89,40
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	89,40
2.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89,40
2.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89,40
2.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,40
2.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90,80
2.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89,40
2.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	90,80
2.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,40
2.14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	89,07
2.15	Pengadaan Mebel	93,60
2.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,80
2.17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	89,40
2.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89,40
2.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84,40
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,40
2.21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,60
2.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,80
2.23	Pemeliharaan Mebel	92,20
2.24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93,60
2.25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88,60
<b>3</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
3.1	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	93,27
3.2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	91,87
3.3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	96,60
3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	91,87
<b>Rata-rata</b>		<b>93,18</b>

### Faktor Pendukung keberhasilan

- Koordinasi internal dan eksternal yang baik
- Ketersediaan anggaran dan SDM yang mendukung pelaksanaan program kegiatan
- Teknologi informasi yang memadai

### Faktor Penghambat keberhasilan (*Jika indikator kinerja tidak tercapai*)

- Pembelian barang melalui MBIZ masih terdapat kendala (penyedia slow respon, spesifikasi terbatas)
- Penggunaan Sisminkada belum optimal (sering error, loading lambat)
- Harga penawaran lebih rendah sehingga terdapat selisih harga dalam pembelian sarana prasarana

### 3.2. Capaian Kinerja Lainnya

#### a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 41 Kontribusi Sasaran Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah**

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	10.74	11.04	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	14	43
						Presentase pelaksanaan fasilitasi	76	100



						kehidupan beragama yang dilaksanakan		
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Penjelasan :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.
2. Pada indikator sasaran terkait persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama, terdapat peran Biro Bina Mental Spiritual terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan meskipun secara tidak langsung. Biro Bina Mental Spiritual setiap tahunnya selalu menganggarkan dana hibah kepada lembaga keagamaan, salah satunya Baznas. Dana yang disalurkan ke Baznas digunakan untuk operasional kelembagaan diantaranya publikasi laporan keuangan, renovasi gedung, dan hal-hal operasional yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, Baznas dan Biro Bina Mental Spiritual bermitra dalam upaya peningkatan kualitas hidup sosial masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal bertajuk Kampung Berkah.

**Tabel III. 12 Kontribusi Program Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah**

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tinggi	Tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.36	93.18	103.12%
		2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.43	86.67					

Penjelasan:

1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dipengaruhi oleh pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Biro Bina mental Spiritual pada tahun 2023 mampu melampaui target nilai PKKI sebagaimana pada tabel di atas.

### 3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Pesentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	14	43	307.14	32.290.682.400	31.856.143.084	98.65	1.35
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	76	100	131.58	30.871.193.000	30.529.865.006	98,89	1.11
2	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100%	851.708.300	698.316.626	81.99	18.01
<b>Jumlah</b>						33.142.390.700	32.554.459.710	98.22	1.78
<b>Total Belanja Operasional</b>						33.095.954.400	32.508.023.410	98.22	1.78

Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Spiritual Th 2023, Laporan Keuangan Biro Bina Mental Spiritual Th 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Biro Bina mental Spiritual melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp33.142.390.700, terealisasi Rp32.554.459.710 atau 98.22% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp587.930.990 atau 1.78% yang bersumber dari:

1. Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga
2. Honorarium sebagian narasumber tidak dapat dicairkan karena narasumber berstatus ASN
3. Penyesuaian kegiatan yang direncanakan luring menjadi daring

### **3.4. Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Sistem Informasi Bantuan Hibah (SIMBAH)  
Tujuan dari pembangunan aplikasi SIMBAH yaitu untuk mempermudah proses layanan penyaluran hiba dan penyimpanan dokumen terkait pelaksanaan hibah baik tempat ibadah maupun lembaga.
- b. Aplikasi Posbindu Satriya  
Aplikasi Posbindu Satriya diinisiasi dan dikembangkan oleh Biro Bina Mental Spiritual pada tahun 2023. Tujuan pengembangan aplikasi Posbindu yaitu meningkatkan efektivitas pencatatan dan pelaporan pelayanan Posbindu. Keunggulan Aplikasi posbindu: Tersedianya update data (rekam medis) pegawai untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan PTM di DIY khususnya di Komplek Kepatihan.
- c. Kampung Berkah  
Kegiatan Kampung Berkah merupakan inovasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi local melalui budidaya perikanan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting.

### **3.5. Lintas Sektor**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Bina Mental Spiritual adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 54 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY (terkait RB tematik)**

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Penyaluran Hibah melalui Baznas	Bank BPD DIY	Bank mitra yang berperan sebagai perantara penyaluran hibah ke Baznas	Dokumen laporan pertanggung jawaban hibah dari Baznas	Kelompok Pemberdayaan Masyarakat, UMKM kecil dan menengah	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama</li> <li>Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan rakyat</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan hibah ke baznas DIY.</li> </ol>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
2.	Pengembangan Aplikasi SIMBAH-Sistem Informasi Bantuan Hibah	CV Tera Harjo Infotek	Konsultasi dan komunikasi terkait pengembangan aplikasi SIMBAH	Penerapan Aplikasi SIMBAH yang efektif dan efisien	Masyarakat dan lembaga pengusul hibah	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian indikator sasaran Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran: Mengefisien dan mengefektifkan proses input, pendokumentasian, serta penyimpanan data secara online yang terkait dengan hibah rumah ibadah. Keunggulan aplikasi tersebut yaitu mempermudah pemangku kepentingan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, masyarakat dapat memantau proses pemberian hibah secara transparan dan akuntabel</p>
		Masyarakat	Memberikan masukan terkait permasalahan proses hibah			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
3.	Monev Kebijakan Stunting DIY	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas P3AP2, Biro Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, Disdikpora, Bppeda DIY	Koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan stunting	Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan RAD Stunting di DIY	Masyarakat umum	<p>Bagi OPD: Memberikan gambaran program/ kegiatan, target dan kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan RAD Stunting di DIY sehingga mempermudah penyusunan kebijakan yang tepat sasaran</p> <p>Bagi kelompok sasaran: Pencegahan stunting dari tingkat kalurahan hingga ke tingkat kab/kota</p>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
4.	Aplikasi Posbindu Satriya	CV Tera Harjo Infotek	Konsultasi dan komunikasi terkait pengembangan aplikasi Posbindu Satriya	Meningkatnya efektivitas dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular	ASN di Lingkungan Kepatihan Sekretariat Daerah DIY	<p>Bagi OPD: Memper memudahkan kader dalam memantau rekam medis anggota posbindu untuk mendeteksi penyakit tidak menular.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran: Memper memudahkan anggota dalam mengupload rekam medis sehingga dapat memantau perkembangan kesehatan secara berkala.</p>
5.	Kampung Berkah	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Penasihat, konsultasi dan komunikasi	Laporan BKK dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah	Masyarakat Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul	<p>Bagi OPD: 1. Mendukung program pemda dalam upaya pengentasan kemiskinan</p> <p>Bagi kelompok sasaran 1. Memberdayakan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal</p>
		Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul	Kelompok sasaran penerima bantuan keuangan khusus			
		Patil Berkah	(mendampingi dalam proses perencanaan, penyediaan benih, pengelolaan hingga pemasaran			



NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Baznas	mitra Biro Bina Mental dalam menginisiasi program kampung berkah			
		Paniradya Kaistimewaan dan BPKA	penyedia, fasilitator, dan verifikator anggaran BKK			

# BAB IV Penutup

---

**Bab IV berisi :**

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

## 4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023 berdasarkan indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan sebesar 43% dari target 14% sehingga persentase total capaian terhadap target sebesar 307.14%. Selain itu, persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan tercapai 100% dari target 76%, atau total capaian kinerja terhadap target sebesar 131,58%.
2. Hambatan permasalahan kinerja di Biro Bina Mental Spiritual pada tahun 2023 diantaranya meliputi:
  - a) Dinamika Kebijakan pusat sesuai perubahan kondisi dan tuntutan pelaksanaan kebijakan terkait di lapangan;
  - b) Proses pengumpulan data oleh surveyor tidak mudah karena instansi mitra belum tentu dapat memenuhi permintaan dengan segera;
  - c) Dalam proses penyusunan produk hukum, peserta yang diundang berbeda-beda disetiap pertemuan sehingga pemahaman mengenai materi tidak berkesinambungan;
  - d) Beberapa tempat ibadah calon penerima hibah tidak menindaklanjuti proses hibah dikarenakan tercukupi oleh pendanaan di luar APBD, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika politik menjelang pemilu;
  - e) Tingkat kesadaran masyarakat penerima hibah dalam menyelesaikan administrasi hibah kurang optimal.
3. Faktor kunci keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2023 diantaranya:
  - a) Ketepatan Menganalisa Kebutuhan Regulasi;
  - b) Kerjasama yang efektif dengan mitra kerja dalam penyusunan isu strategis;
  - c) Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan;
  - d) Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
  - e) Dukungan teknologi informasi yang mutakhir.

#### **4.2. Langkah Perbaikan Kinerja**

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kajian dan bahan kebijakan
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan pemangku kepentingan terkait
3. Memberikan motivasi kepada pengusul hibah agar tepat waktu dalam mengumpulkan laporan pertanggungawaban
4. Mengikuti perkembangan terkini terkait regulasi dan pemanfaatan teknologi

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks RPD)

No	Sasaran Strategis	IndikatorSasaran	Satuan	Baseline 2022	Target tahunan				
					2023	2024	2025	2026	Akhir 2026
1	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.	%	n/a	14	24	34	44	44
		Persentase pelaksanaan fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	n/a	76	77	78	79	79

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦱꦼꦏꦼꦠꦼꦂꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦏꦿꦠꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818  
Website: binamentals.jogjaprov.go.id Email: birobinamentals@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SETDA DIY,  
  
DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.  
NIP. 196806051998031011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Biro Bina Mental Spiritual  
 Jabatan : Kepala Biro Bina Mental Spiritual

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Tahunan (5)	Triwulan (6)	Target (7)
1.	Meningkatnya kualitas penemuan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Pesentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	14	Triwulan I	14
					Triwulan II	14
					Triwulan III	14
					Triwulan IV	14*)
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kesejahteraan Rakyat (APBD)	Rp31.650.252.400
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp851.706.300
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp640.430.000
	Jumlah Anggaran	Rp33.142.390.700

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

PIHAK KEDUA  
 GUBUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
 HAMENGGU BUWONO X

Yogyakarta, 8 November 2023  
 PIHAK PERTAMA  
 KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
 DARROT MARDIANA TJOTO, S.T.P., M.Sc.  
 NIP. 196503081995031011

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**INSPEKTORAT**

*Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta*

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567  
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> e-mail: [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55168

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Nomor : 700/1061  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) pada Biro  
Bina Mental Spiritual Setda DIY  
Tahun 2022

Kepada  
Yth. Kepala Biro Bina Mental Spiritual  
Setda DIY  
di -  
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Keputusan ...



- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 055/MI/NSP/2023, Tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

## **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh ...

---

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

#### **6. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Bina Mental dan Spiritual Selda DIY mempunyai tugas "Melaksanakan Fungsi Pendukung Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Bina Mental Spiritual.

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Bina Mental dan Spiritual Selda DIY mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Biro Bina Mental Spiritual;
- b. Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Fasilitasi Kehidupan Beragama, Kebudayaan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Penyiapan Bahan Koordinasi Perumusan Kebijakan Beragama, Kebudayaan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Fasilitasi Kehidupan Beragama;
- e. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengevaluasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Fasilitasi Kehidupan Beragama, Kebudayaan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;
- g. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Biro; dan
- h. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Susunan Organisasi Biro Bina Mental dan Spiritual Selda DIY terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan, terdiri atas:
  - 1). Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama; dan
  - 2). Subbagian Tata Usaha.
- c. Substansi Kebijakan Kesehatan, terdiri atas:
  - 1). Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kesehatan Masyarakat; dan
  - 2). Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

d. Substansi...

d. Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- 1). Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- 2). Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

e. Jabatan Fungsional.

#### **7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Implementasi AKIP pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### **8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Pembinaan rutin pegawai dalam bentuk apel yang dilakukan setiap seminggu sekali pada senin pagi;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin (mingguan, bulanan, triwulanan) untuk mengoptimalkan capaian sasaran/kinerja organisasi.

B. GAMBARAN...

## **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memperoleh nilai sebesar 85,50. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,00 atau 86,66% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,69 atau 85,64% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,76 atau 85,05% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,05 atau 84,20% dari bobot sebesar 25%.

### **2. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY agar meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan pihak eksternal terkait dalam rangka pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang lebih baik, termasuk dalam hal ini pencapaian kinerja hibah keagamaan.

## **C. PENUTUPAN**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memperoleh nilai 85,50. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### **2. Penguatan AKIP**

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian...

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦤ꧀ꦢꦺꦫꦏꦸꦫꦶꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Pswt 1169

Website: binamentals.jogjaprov.go.id Email: [binamentals@jogjaprov.go.id](mailto:binamentals@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA  
Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01061 tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) ada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022 Rekomendasi:</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan pihak eksternal terkait dalam rangka pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang lebih baik, termasuk dalam hal ini pencapaian kinerja hibah keagamaan.</p>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <p>1. Mengintensifkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran/kinerja Biro Bina Mental Spiritual. 2. Memaksimalkan kinerja hibah keagamaan melalui monitoring dan evaluasi selama proses hibah.</p>

Yogyakarta, 3 April 2023

Kepala Biro Bina Mental Spiritual,



DAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.

NIP. 1966060819980310111



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**